

ADVOKASI REVOLUSI MENTAL ASN KOTA JAYAPURA: PENINGKATAN KAPASITAS ASN UNTUK AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Akbar Silo¹, Alfani Laura Harikedua^{2*}, Fadly Yizhar³, Rut Penina Somisu⁴

^{1,3}Program Pascasarjana, Universitas Cenderawasih

^{2,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

email: alfaniharikedua@feb.uncen.ac.id

Abstract: The 2024 Bureaucratic Reform Index (IRB) of Jayapura City, categorized as "CC", reflects sub-optimal civil servant management and public service quality, rooted in weak work culture and organizational capacity. This Community Service activity aims to enhance civil servants' understanding of the strategic position of Mental Revolution in bureaucratic reform through the lens of Public Value Governance. The method used is participatory advocacy through material presentation and Focused Group Discussion (FGD) involving the Government Division, Inspectorate, and Organization and Management Division of the Jayapura City Regional Secretariat. The results showed an increase in collective understanding among civil servants regarding the importance of behavioral transformation for substantive public services. The concrete output of this activity is the presentation of strategic recommendations containing proposals for the 2025-2030 Mental Revolution roadmap and the reorientation of training curricula based on local competencies. In conclusion, strengthening integrity, work ethic, and mutual cooperation through this approach serves as a strategic foundation to reinforce governance and increase public value in Jayapura City.

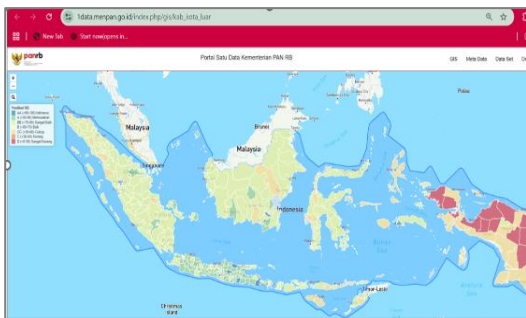
Keywords: civil servant; mental revolution; participatory advocacy; public value governance; bureaucratic reform.

Abstrak: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Jayapura tahun 2024 yang berada pada kategori "CC" mencerminkan belum optimalnya manajemen ASN dan kualitas pelayanan publik, yang berakar pada lemahnya budaya kerja dan kapasitas organisasi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman ASN mengenai posisi strategis Revolusi Mental dalam reformasi birokrasi melalui lensa Public Value Governance. Metode yang digunakan adalah advokasi partisipatif melalui paparan materi dan diskusi terfokus (*Focused Group Discussion*) yang melibatkan Bagian Pemerintahan, Inspektorat, dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Jayapura. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman kolektif ASN mengenai pentingnya transformasi perilaku untuk pelayanan publik substantif. Output nyata kegiatan ini berupa paparan rekomendasi strategis terkait roadmap Revolusi Mental ASN 2025-2030 dan reorientasi kurikulum diklat berbasis kompetensi lokal. Kesimpulannya, penguatan integritas, etos kerja, dan gotong royong melalui pendekatan ini menjadi fondasi strategis untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan nilai publik di Kota Jayapura.

Kata kunci: advokasi partisipatif; ASN; *public value governance*; reformasi birokrasi; revolusi mental.

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan ekonomi yang inklusif (Fauzan, 2024). Di tingkat daerah, ASN berperan sebagai aktor kunci dalam penerjemahan kebijakan nasional ke dalam program dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Di Kota Jayapura, sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Papua, kualitas kinerja ASN menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah.



Gambar 1. Peta Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2024

Namun demikian, berbagai evaluasi menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah masih menghadapi tantangan serius. Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Jayapura tahun 2024 berada pada kategori CC (cukup). Capaian ini mencerminkan belum optimalnya manajemen ASN, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan publik. Secara nasional, wilayah Papua juga masih tergolong dalam kategori capaian reformasi birokrasi yang rendah, menandakan adanya persoalan struktural dalam

penyelenggaraan birokrasi pemerintahan daerah.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada efektivitas implementasi kebijakan strategis daerah, termasuk pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Secara normatif, regulasi Otonomi Khusus memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan fiskal, perencanaan pembangunan, serta afirmasi kebijakan sosial-ekonomi masyarakat Papua. Namun secara empiris, lemahnya kapasitas ASN yang tercermin dari belum optimalnya perencanaan berbasis kinerja, rendahnya integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta belum tersusunnya proses bisnis yang terstandarisasi menyebabkan pemanfaatan kewenangan dan dukungan fiskal Otonomi Khusus belum sepenuhnya efektif. (Latupeirissa et al., 2021).

Di sisi lain, ASN Kota Jayapura juga menghadapi kompleksitas pelayanan publik perkotaan yang semakin meningkat, khususnya pada sektor administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, perizinan usaha, serta pengelolaan infrastruktur dan lingkungan perkotaan. Dalam praktiknya, kompleksitas tersebut tercermin pada masih terjadinya antrean panjang dalam pelayanan administrasi kependudukan pada periode tertentu, keterlambatan penyelesaian perizinan usaha akibat proses yang belum sepenuhnya terdigitalisasi, serta keluhan masyarakat terkait lambannya respons terhadap pengaduan layanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban pelayanan yang tinggi belum sepenuhnya diimbangi oleh sistem kerja yang terintegrasi dan kapasitas aparatur yang adaptif terhadap

tuntutan digitalisasi birokrasi. (Mirino et al., 2025).

Beban pelayanan yang tinggi tersebut menuntut perubahan paradigma birokrasi dari pola kerja administratif prosedural menuju birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi kinerja (Ode Muhammad Ichwan Sjachrawy et al., 2025) Tanpa perubahan pola pikir dan budaya kerja, ASN akan sulit menjawab tuntutan masyarakat perkotaan yang semakin dinamis dan menuntut standar pelayanan yang cepat, transparan, serta akuntabel.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah secara nasional telah mendorong Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016. Revolusi Mental menekankan internalisasi tiga nilai utama, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong, sebagai fondasi dalam membangun aparatur yang profesional dan berorientasi pelayanan publik (Lay & Wadu, 2024).

Pendekatan Revolusi Mental tersebut dikontekstualisasikan melalui perkembangan teori tata kelola publik kontemporer yang menekankan penciptaan nilai publik sebagai tujuan utama administrasi pemerintahan. Dalam kerangka Public Value Governance (PVG) (Fohim et al., 2025), birokrasi bertanggung jawab menciptakan nilai publik melalui kolaborasi, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat. Penguatan kapasitas ASN melalui internalisasi nilai Revolusi Mental—integritas, etos kerja, dan gotong royong—menjadi fondasi strategis pembentukan nilai publik tersebut (Kewidyaiswaraan et al., 2025)

Dalam konteks pendampingan, prinsip PVG ini diterapkan untuk membingkai rekomendasi strategis yang

dipaparkan dalam materi advokasi sebagai instrumen transformasi budaya organisasi. Internalisasi nilai-nilai tersebut diarahkan untuk membangun birokrasi yang mampu menghasilkan manfaat publik yang terukur, seperti peningkatan kepercayaan masyarakat dan perbaikan kualitas layanan perkotaan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara tuntutan reformasi birokrasi dengan kapasitas aktual ASN di Kota Jayapura dalam menginternalisasi nilai-nilai Revolusi Mental secara sistematis. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sebagai bentuk advokasi dan penguatan kapasitas ASN untuk mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Kebaruan (novelty) kegiatan ini terletak pada pendekatan advokasi yang mengintegrasikan nilai Revolusi Mental langsung ke dalam rekomendasi berbasis Public Value Governance untuk mengarahkan perubahan budaya kerja ASN menuju pelayanan publik yang substantif, melampaui pendekatan pelatihan administratif konvensional.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada 19 September 2025 bertempat di Kantor Wali Kota Jayapura, bekerja sama dengan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jayapura. Sasaran kegiatan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki peran strategis dalam reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Metode

utama yang digunakan dalam kegiatan ini adalah advokasi partisipatif.

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas ASN tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis-administratif, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, budaya kerja, serta penguatan komitmen aparatur secara berkelanjutan. Advokasi partisipatif digunakan untuk mendorong internalisasi nilai-nilai Revolusi Mental ke dalam pola pikir dan budaya kerja ASN melalui dialog, refleksi bersama, dan keterlibatan aktif peserta dalam mengidentifikasi permasalahan birokrasi yang dihadapi.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Jayapura untuk mengidentifikasi permasalahan utama birokrasi serta menentukan peserta kegiatan dari unit-unit strategis. Pada tahap ini, tim pengabdian juga mengumpulkan dan menelaah data sekunder, antara lain capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Jayapura tahun 2024 dan laporan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) daerah, sebagai dasar dalam penyusunan materi dan strategi advokasi yang berbasis pada Public Value Governance.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan advokasi partisipatif yang mengintegrasikan paparan materi strategis dengan diskusi interaktif terfokus. Materi yang disampaikan mencakup konsep dan urgensi Revolusi Mental ASN, keterkaitannya dengan Public Value Governance dan reformasi birokrasi, serta analisis mendalam mengenai kondisi aktual capaian IRB Kota Jayapura. Dalam sesi diskusi terbuka, peserta didorong untuk

merefleksikan kendala birokrasi yang dihadapi, khususnya terkait implementasi SPBE, penyusunan Peta Proses Bisnis (Probis), serta kolaborasi antar-unit kerja. Sebagai wujud nyata dari proses advokasi ini, tim merumuskan dan memaparkan rekomendasi strategis berupa usulan roadmap Revolusi Mental ASN 2025-2030 dan reorientasi kurikulum diklat berbasis kompetensi lokal kepada mitra sebagai panduan aksi.

Tahap evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui observasi langsung selama kegiatan berlangsung dan wawancara singkat dengan peserta. Evaluasi difokuskan pada perubahan pemahaman ASN mengenai nilai-nilai Revolusi Mental serta komitmen mereka dalam menerapkan prinsip integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam pelaksanaan tugas. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan capaian kegiatan dan respons peserta terhadap penerapan metode advokasi partisipatif.

PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman kolektif ASN mengenai posisi strategis Revolusi Mental dalam reformasi birokrasi di Kota Jayapura. Partisipan kini memandang Revolusi Mental bukan sekadar slogan, melainkan strategi transformasi perilaku yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif *Public Value Governance*, perubahan budaya organisasi ini menjadi prasyarat fundamental untuk menciptakan nilai publik melalui integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Sebagai output nyata dari kegiatan ini, tim PKM memberikan rekomendasi strategis yang dipaparkan

kepada mitra, mencakup usulan penyusunan Roadmap Revolusi Mental ASN Kota Jayapura 2025–2030; Reorientasi kurikulum diklat berbasis kompetensi lokal; Integrasi nilai-nilai kearifan lokal Jayapura dalam pelayanan publik; dan Riset kolaboratif Pemkot – Universitas – LAN.



Gambar 2. Pemaparan Materi

Identifikasi masalah yang menjadi fokus diskusi, yaitu optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penyusunan Peta Proses Bisnis (Probis), dan penguatan kolaborasi antar-unit kerja, merupakan prioritas utama mitra. Hal ini didasarkan pada data faktual bahwa Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Jayapura tahun 2024 masih berada pada predikat "CC" atau "Cukup". Dalam diskusi interaktif yang melibatkan Kabag Pemerintahan, Inspektorat, dan Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Ortal), terungkap bahwa hambatan teknis tersebut berakar pada aspek kapasitas organisasi dan budaya kerja.



Gambar 3. Advokasi Interaktif

Ringkasan temuan diskusi menunjukkan bahwa implementasi SPBE yang belum optimal tidak semata disebabkan oleh infrastruktur, tetapi oleh belum kuatnya budaya kerja yang adaptif terhadap inovasi dan transparansi. Demikian pula, belum tersusunnya Probis secara terstandarisasi mencerminkan lemahnya konsistensi tata kelola yang menjadi fondasi akuntabilitas kinerja.

Masalah rendahnya kolaborasi antar-unit kerja juga diakui mitra sebagai kendala dalam integrasi kebijakan pelayanan publik perkotaan, seperti perizinan usaha dan infrastruktur. Melalui poin-poin rekomendasi yang disampaikan, kegiatan ini menawarkan solusi berupa internalisasi nilai integritas dan gotong royong ke dalam sistem manajemen kinerja. Intervensi ini diharapkan dapat memperkuat fondasi tata kelola sehingga reformasi birokrasi di Kota Jayapura mampu menghasilkan manfaat publik yang substantif serta mendukung akselerasi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Jayapura, khususnya Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jayapura, atas dukungan dan fasilitasi kegiatan ini. Penghargaan juga disampaikan kepada Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih atas dukungan pendanaan melalui skema Pengabdian PNPB BLU Tahun 2025 serta kepada seluruh ASN peserta kegiatan atas partisipasi aktifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, R. (2024). 97 Menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) Bertaraf Internasional. In *Public Service And Governance Journal* (Vol. 5, Number 1).
- Fohim, E., Jacobs, C. D., & Sieger, P. (2025). Expanding towards a Public Value Governance paradigm: the role of mindset expansion in a Swiss government agency. *Public Management Review*, 1–38. <https://doi.org/10.1080/14719037.2025.2566903>
- Kewidyaiswaraan, J., Energi, K., Sumber, D., Mineral, D., Kebtke, P., Esdm, K., Kunci, K., Asn, N.-N., & Dasar, P. (2025). Zainul M Pulungan. *Jurnal Kewidyaiswaraan*, 10(1). <https://jurnalwi.lan.go.id/index.php/jurnalkewidyaiswaraan>
- Latupeirissa, J. J. P., Wijaya, I. P. D., & Suryawan, I. M. Y. (2021). Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 168–178. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3496>
- Lay, M. R., & Wadu, J. (2024). Membangun Aparatur Sipil Negara melalui Revolusi Mental. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(8). <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>
- Mirino, S., Jayapura, A. K., Program, P., Administrasi, S., Daerah, P., Skripsi, P., Suropto, D. H., & Si, M. (2025). *Efektivitas Mal Pelayanan Publik Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kota Jayapura Provinsi Papua*. <http://eprints.ipdn.ac.id/24802/>
- Ode Muhammad Ichwan Sjachrawy, L., Thasman, T., Satyadharma, M., Susanti, N., & Hado, H. (2025). Transformasi Birokrasi melalui Inovasi Pelayanan Publik: Kajian Literatur tentang Reformasi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Parabola: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 5(1), 37–52. <https://doi.org/10.51454/z7ysp660>